



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

RANHIR RENSTRA 2025-2029

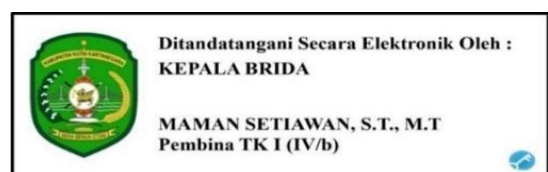
KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025– 2029 ini merupakan wujud nyata dari komitmen BRIDA dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi, selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan teknokratis yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 serta Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta menjadi implementasi visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029. Penyusunan Renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan Petunjuk Teknis Penyusunan Renstra OPD melalui Surat Nomor: P-355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024.

Renstra ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, hingga penguatan daya saing daerah melalui inovasi daerah. Melalui dokumen ini dapat menjadi landasan strategis bagi Badan Riset Dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelitbangan secara lebih terarah dan efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara: “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tenggarong, 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	5
Dasar Hukum Penyusunan.....	9
Maksud dan Tujuan.....	12
Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Perbup SOTK).....	15
2.1.2 Sumber Daya BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara.....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	28
2.2.2 Isu Strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara.....	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1. Tujuan dan Sasaran	31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	38
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Prioritas Pembangunan Daerah	45
4.2. Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	45
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	46
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD	47
BAB V PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Gambar 1.	Struktur Organisasi BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	15
Gambar 2.	Konsep Renstra BRIDA	33
Gambar 3.	Kerangka Keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra BRIDA	34
Gambar 4.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub KegiatanRenstra BRIDA	49
Tabel 1.	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	16
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Sesuai dengan Tingkat Golongan	16
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Sesuai dengan Jabatan Struktural dan Fungsional	17
Tabel 4.	Penggunaan Anggaran	18
Tabel 5.	Kinerja Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	25
Tabel 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara.....	26
Tabel 7.	Mitra Kerjasama BRIDA Kab. Kutai Kartanegara	28
Tabel 2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BRIDA Kab. Kutai Kartanegara.....	30
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran BRIDA Kab. Kutai Kartanegara	34
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	39
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	40
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	50
Tabel 4.2.	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	51
Tabel 4.3.	Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara	65
Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	83
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah lembaga atau unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah tersebut. OPD berfungsi sebagai pelaksana kebijakan daerah yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola berbagai urusan pemerintahan yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi bidang-bidang yang langsung berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Setiap urusan yang dikelola OPD memiliki arti penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Urusan wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan yang mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas, atau infrastruktur yang memperlancar kegiatan ekonomi dan aksesibilitas. Di sisi lain, urusan pilihan memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian.

Meski beberapa urusan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, peran OPD tetap terhubung melalui alur yang strategis. Misalnya, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA), meskipun tidak melayani masyarakat secara langsung, menghasilkan data, riset, dan inovasi yang digunakan OPD lain dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Contohnya, hasil riset BRIDA dapat membantu Dinas Pertanian meningkatkan produktivitas petani melalui teknologi modern, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, OPD berfungsi sebagai elemen penyusun yang saling melengkapi dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, di mana setiap tugas, program, dan kebijakan yang dilaksanakan bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah yang sangat penting untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah yang terencana dengan baik, terarah pada tujuan yang jelas, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah tidak hanya berlangsung secara sistematis, tetapi juga berlandaskan visi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Penyusunan Renstra ini juga didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara tegas menyatakan perlunya dokumen perencanaan yang mampu mengakomodasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjadikan Renstra sebagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra menjadi pijakan utama dalam membangun sinergi antara visi besar pembangunan daerah dan implementasi program-program pembangunan yang bersifat operasional.

Sebagai elemen penting dalam mendukung urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan hasil penelitian dan inovasi yang relevan. Fungsi utama Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) diatur melalui sejumlah regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk menjalankan tugasnya, mulai dari merancang program, melaksanakan kegiatan penelitian, memantau pelaksanaannya, hingga mengevaluasi

dampaknya terhadap pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program penelitian dan pengembangan yang dilakukan berbasis pada data yang akurat, inovasi yang relevan, serta teknologi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Lebih dari itu, penyusunan Renstra juga memiliki peran penting dalam memperkuat sistem riset dan inovasi daerah, yang menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah era globalisasi yang semakin kompetitif. Melalui Renstra ini, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) diharapkan mampu memfasilitasi terciptanya kolaborasi yang efektif antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah, yang dikenal dengan pendekatan triple helix. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi berbasis teknologi. Selain itu, Renstra ini juga mengintegrasikan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari hasil riset dan inovasi yang dilakukan. Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan, sekaligus mendorong komersialisasi produk riset yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas kegiatan kelitbangan, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 045.2/2223/P1/XII/litbang/2012 menegaskan bahwa seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dilaksanakan oleh perangkat daerah lain kini harus dikoordinasikan dengan Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA). Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan yang tidak perlu, memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien, serta mendorong terciptanya harmonisasi program riset dan inovasi yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar Renstra dapat diimplementasikan secara optimal. Beberapa kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang penelitian dan pengembangan, serta minimnya pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sistematis. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi

antar pihak, dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan Renstra dalam mendukung pembangunan daerah.

Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan dan menyelaraskan riset, inovasi, dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program dalam RPJMD periode 2025–2029 dapat diwujudkan secara efektif melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Renstra ini juga menitikberatkan pengelolaan hasil riset agar dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai HKI, baik berupa paten, hak cipta, merek dagang, maupun desain industri. Dengan pengelolaan HKI yang terstruktur, hasil penelitian tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat inovasi yang diakui baik di tingkat regional maupun nasional.

Sejalan dengan urgensi penyusunan Renstra yang sebelumnya telah dijelaskan, dokumen strategis ini juga menjadi upaya penting untuk meningkatkan kapasitas Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan seperti perubahan lingkungan strategis, peningkatan kebutuhan akan inovasi, serta tuntutan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas berbasis riset memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan terintegrasi. Dengan adanya Renstra ini, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) diharapkan mampu menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kondusif, memaksimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat pengelolaan HKI sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berbasis pengetahuan.

Melalui penyusunan Renstra ini, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peluang untuk menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan solusi berbasis inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendekatan ini mendukung kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah (triple helix) untuk menghasilkan solusi inovatif yang dapat menjawab tantangan

pembangunan secara komprehensif. Selain itu, pengelolaan HKI yang baik juga akan mendorong komersialisasi hasil riset sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara di era globalisasi.

Pada akhirnya, Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Dengan dokumen ini, Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat lebih terarah dalam melaksanakan perannya sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah melalui riset, inovasi, dan pengelolaan HKI yang strategis dan efektif. Hal

ini selaras dengan visi besar pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi daerah yang berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan potensi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
24. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA);
29. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-

2838/BAPP/065.11/06/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada urusan penelitian dan pengembangan,
- 2) Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan penelitian dan pengembangan,
- 3) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B- 2838/BAPP/065.11/06/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

2.1 Gambaran Pelayanan

- 2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi BRIDA
- 2.1.2 Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan kelembagaan
- 2.1.3 Kinerja pelayanan sebelumnya
- 2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.2.1 Permasalahan pelayanan riset dan inovasi
- 2.2.2 Isu Strategis BRIDA

2.3 Isu Strategis Daerah, Nasional, Global Yang Relevan

Telaahan visi-misi Kukar IDAMAN TERBAIK, RTRW, KLHS, RPJMN

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra BRIDA 2025–2029

3.2 Sasaran Renstra BRIDA 2025–2029

3.3 Strategi pencapaian tujuan dan sasaran

3.4 Arah kebijakan riset dan inovasi daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja

4.1 Program BRIDA (mengacu nomenklatur Permendagri)

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan prioritas

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.5 Rencana pendanaan dan pagu indikatif 2025–2029

4.6 Evaluasi capaian kinerja Renstra periode sebelumnya

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BRIDA berperan sebagai penggerak riset, pengembangan dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

1. Pelayanan Riset dan Kajian

- Fasilitasi dan pelaksanaan penelitian/kajian kebijakan daerah
- Penyusunan rekomendasi berbasis evidence bagi kepala daerah dan OPD
- Pengelolaan data dan hasil riset daerah

2. Pelayanan Inovasi Daerah

- Pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik
- Inventarisasi, verifikasi, dan penilaian inovasi daerah
- Dukungan implementasi inovasi di OPD, kecamatan, desa, sekolah, dan puskesmas

3. Fasilitasi Kolaborasi Riset

- Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas
- Penguatan ekosistem triple helix / penta helix
- Sinkronisasi riset daerah dengan kebijakan nasional

4. Pengembangan SDM IPTEK

- Peningkatan kapasitas ASN dalam riset, penulisan kebijakan, dan inovasi
- Bimbingan teknis, workshop, dan coaching inovasi
- Dukungan terhadap peneliti dan inovator daerah

5. Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset

- Publikasi hasil riset dan inovasi
- Seminar, forum ilmiah, dan knowledge sharing
- Mendorong pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan dan penganggaran daerah

6. Pelayanan Administratif dan Pendukung

- Layanan perizinan/registrasi riset (sesuai kewenangan daerah)
- Layanan informasi riset dan inovasi
- Pengelolaan dokumentasi dan database inovasi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Tugas BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Tugas Umum BRIDA

Menurut Pasal 4 Perbup Nomor 1 Tahun 2023, tugas umum BRIDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi. Tugas ini bersifat strategis dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan integrasi riset dengan perencanaan daerah.

Secara rinci, tugas umum mencakup:

- **Pengelolaan Data dan Informasi:** Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data serta informasi untuk mendukung perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja pemerintahan daerah. Ini termasuk data ekonomi, sosial, kependudukan, dan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan daerah;
- **Koordinasi dan Kolaborasi:** Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Bappeda, BRIDA Provinsi Kalimantan Timur, dan BRIN, untuk kegiatan riset bersama.
- **Pengawasan dan Evaluasi:** Memastikan pelaksanaan riset dan inovasi sesuai regulasi, termasuk pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang fokus pada pengelolaan anggaran dan kepatuhan.

b. Tugas Spesifik Berdasarkan Bidang

Perbup Nomor 1 Tahun 2023 membagi tugas BRIDA ke dalam bidang-bidang organisasi, yang masing-masing memiliki uraian tugas rinci. Berikut adalah penjelasan lengkap:

b.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan:

- Melakukan kajian dan riset terkait governance daerah, termasuk review peraturan perundang-undangan untuk mendukung kebijakan Bupati;
- Menganalisis dampak regulasi terhadap pembangunan;
- Menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan berdasarkan data empiris, dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi.

b.2. Bidang Sosial dan Kependudukan:

- Melaksanakan riset sosial, demografi, dan isu kependudukan;
- Mengumpulkan dan menganalisis data sosial untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat;
- Mendukung perlindungan hak anak dan perempuan melalui riset berbasis gender;
- Mendukung pengukuran indeks seperti Indeks Pembangunan Gender atau Indeks Daya Saing Daerah, serta indeks lainnya.

b.3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

- Melakukan kajian ekonomi dan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan PAD dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Menganalisis peluang ekonomi lokal, seperti inisiasi masyarakat peduli indikasi geografis;
- Menyusun data untuk perumusan APBD, dengan fokus pada inovasi ekonomi berkelanjutan.

b.4. Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi:

- Mengelola inovasi teknologi, termasuk penerapan teknologi baru di daerah;
- Mendorong ekosistem riset dan inovasi, mulai dari tingkat sekolah hingga level tinggi, sesuai arahan BRIN;
- Menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek) daerah.

c. Tugas Tambahan dan Kolektif

Selain tugas bidang, BRIDA memiliki tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati, seperti:

- Sosialisasi dan Pendidikan: Melaksanakan sosialisasi bagi ASN, untuk meningkatkan kapasitas riset internal;
- Pelaporan dan Integrasi: Melaporkan hasil riset kepada Bupati dan BRIN, serta mengintegrasikan riset dengan RPJMN dan RPJMD;
- Perlindungan dan Pengembangan: Mendukung pembentukan masyarakat peduli HAKI dan indikasi geografis.

Tugas BRIDA bersifat kolektif, melibatkan sekretariat (untuk administrasi) dan kelompok jabatan fungsional (peneliti, analis). Tugas ini didukung oleh anggaran pagu generik dalam Rencana Kerja Tahunan, dengan penekanan pada evaluasi kinerja.

d. Fungsi BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Fungsi BRIDA diperkuat melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan peta jalan yang baru disusun, yang menekankan integrasi riset dan inovasi dengan pembangunan daerah, termasuk perubahan nama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi BRIDA untuk menyesuaikan kebijakan nasional.

Fungsi BRIDA bersifat penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi, dengan fokus pada penyediaan data berbasis riset untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Pasal 5 Perbup Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023, BRIDA berfungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang riset dan inovasi. Fungsi ini bersifat kolektif dan terintegrasi dengan sistem nasional BRIN, dengan penekanan pada kolaborasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan riset untuk mendukung RPJMD dan RPJMN.

Fungsi ini mencakup:

- Perumusan Kebijakan Teknis: Menyusun kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi;
- Pelaksanaan Kebijakan: Melaksanakan riset, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk pengumpulan dan analisis data untuk mendukung perencanaan pembangunan;
- Fasilitasi dan Pembinaan: Memfasilitasi kolaborasi dengan instansi terkait, seperti BRIN, universitas, sektor swasta, dan BRIDA provinsi, untuk memperkaya perspektif riset dan mempercepat penerapan inovasi;
- Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian: Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan riset dan inovasi, termasuk pengendalian agar selaras dengan regulasi nasional;
- Pelaporan dan Rekomendasi Kebijakan: Melaporkan hasil riset kepada Bupati dan BRIN, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data empiris untuk mendukung pengambilan keputusan.

e. Struktur Organisasi BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Perbup Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan BRIDA sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati dalam urusan riset dan inovasi, dengan struktur yang dirancang untuk efisiensi dan spesialisasi. Struktur ini bersifat hierarkis, dimulai dari Kepala Badan sebagai pimpinan tertinggi, diikuti oleh sekretariat, bidang-bidang fungsional, kelompok jabatan fungsional, dan unit pelaksana teknis (jika diperlukan). Tidak ada perubahan signifikan pada struktur sejak 2023. Berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 12 Perbup Nomor 1 Tahun 2023, susunan organisasi BRIDA terdiri atas unsur-unsur berikut, dengan deskripsi kedudukan, tugas pokok, dan hubungan hierarkis:

a. Kepala Badan:

- **Kedudukan:** Pemimpin tertinggi BRIDA, bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Kartanegara. Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- **Tugas Pokok:** Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan BRIDA, menyusun kebijakan strategis riset dan inovasi, serta melaporkan kinerja kepada Bupati dan BRIN nasional;
- **Hubungan Hierarkis:** Mengawasi semua unsur di bawahnya, termasuk Sekretaris dan bidang-bidang.

b. Sekretaris:

- **Kedudukan:** Jabatan eselon III.a, bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris bertugas mendukung administrasi internal BRIDA;
- **Tugas Pokok:** Mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, kepegawaian, dan tata usaha, menyusun laporan kinerja, serta memfasilitasi koordinasi antar bidang;

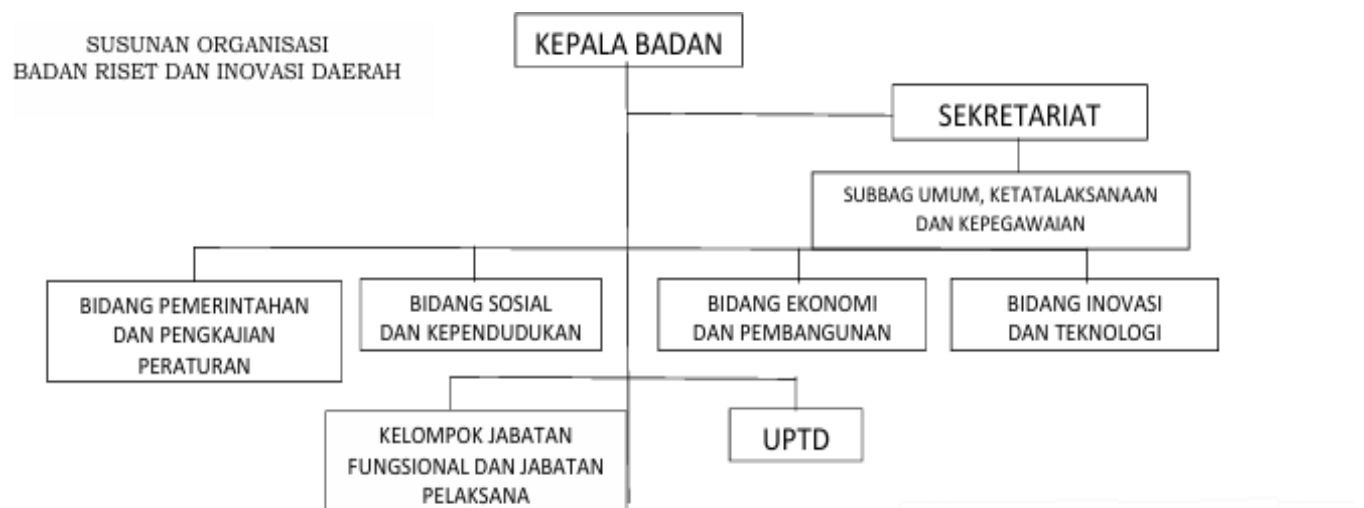
Sub Bagian:

1. Sekretariat atau Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

- Menangani urusan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta penatausahaan keuangan BRIDA;
2. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian:
Menangani urusan rumah tangga, perlengkapan, aset dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN/PPPK, serta tata laksana organisasi.
Hubungan Hierarkis: Berada di bawah Kepala Badan, membawahi sub-bagian, dan mendukung bidang-bidang fungsional.
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan:
- Kedudukan: Jabatan eselon III.b, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - Tugas Pokok: Melakukan riset dan pengkajian terkait tata kelola pemerintahan, review regulasi daerah, dan rekomendasi kebijakan;
 - Hubungan Hierarkis: Koordinasi dengan sekretariat untuk data administrasi.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan:
- Kedudukan: Jabatan eselon III.b.
 - Tugas Pokok: Fokus pada riset sosial, demografi, dan isu kependudukan, seperti kajian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan dampak sosial program pembangunan;
 - Hubungan Hierarkis: Sama seperti bidang lainnya, melapor ke Kepala Badan.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan:
- Kedudukan: Jabatan eselon III.b.
 - Tugas Pokok: Menganalisis peluang ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan PAD melalui kajian BUMD;
 - Hubungan Hierarkis: Integrasi dengan Bappeda untuk perencanaan pembangunan.
- f. Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi:
- Kedudukan: Jabatan eselon III.b;
 - Tugas Pokok: Mengelola inovasi teknologi, penerapan Iptek, dan perlindungan HAKI;
 - Hubungan Hierarkis: Kolaborasi dengan BRIN nasional untuk teknologi baru.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional:
- Kedudukan: Kelompok pegawai fungsional seperti peneliti, analis kebijakan, dan ahli teknologi, yang tidak termasuk dalam eselon struktural;

- Tugas Pokok: Melaksanakan tugas teknis harian riset dan inovasi, seperti pengumpulan data lapangan dan analisis;
 - Hubungan Hierarkis: Berada di bawah bidang terkait atau langsung ke Kepala Badan untuk tugas khusus.
- h. Untuk UPTD BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini belum ada.

Gambar 1. Struktur Organisasi Tipe A Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Sumber Data: Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber daya perangkat Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencakup sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran yang merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Berikut adalah pembahasan tentang sumber daya perangkat BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan regulasi dan konteks daerah.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Badan Penelitiandan Pengembangan Daerah (BRIDA) kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menangani program dan kegiatan prioritas Sampai dengan akhir Desember 2024, didukung oleh 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 35 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun Pegawai dan Tenaga Harian Lepas yang ada dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. SDM Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SLTA	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Kepala	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	11	7	4	-	22
3.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6	3	1	1	11
4.	Bidang Sosial dan Kependudukan	6	6	-	2	14
5.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	3	1	1	7
6.	Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	3	2	-	8
7.	Jabatan Fungsional Tertentu	1	2	1	2	6
8.	PPPK	11	21	-	-	32
Jumlah		40	45	10	6	101

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	Uraian	Golongan					Jumlah
		PNS			PPPK		
		II	III	IV	V	IX	
1	Kepala	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	11	7	4	3	10	35
3	Bidang Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6	3	2	2	2	15
4	Bidang Sosial dan Kependudukan	6	6	2	1	2	17
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	3	2	3	6	16
6	Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	3	2	2	1	11
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	3	3	-	-	6
8	PPPK						
Jumlah		28	25	16	11	21	101

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

NO	Uraian	JFU	JFT	Eselon			Jumlah
				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	20	1	-	1	1	23
3	Bidang Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10	-	-	1	-	11
4	Bidang Sosial dan Kependudukan	13	-	-	1	-	14
5	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6	-	-	1	-	7
6	Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	7	-	-	1	-	8
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	5	-	-	-	5
8	PPPK	32	-	-	-	-	32
Jumlah		88	6	1	5	1	101

Sumber Data: Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Tahun 2025

b. Anggaran

Anggaran BRIDA diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2024 tentang APBD 2025 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2023 (Pasal 16), yang mengatur pembiayaan dari APBD dan sumber lain yang sah. Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya telah dapat terlaksana dengan baik, dengan tingkat pencapaian rata-rata yaitu 100%. Hal ini menunjukkan kinerja BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus meningkat, apalagi jika dibandingkan dengan keterbatasan- keterbatasan yang masih ada. Selain ditinjau dari pencapaian sasaran rata-rata program dan kegiatan, perkembangan anggaran BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, berbanding lurus dengan realisasi penyerapan anggaran yang mengalami peningkatan yang signifikan pula.

Penyerapan anggaran BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jika dirata-ratakan, tiap tahunnya BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah berhasil menyerap anggaran sebesar 87,6 persen dari total pagu yang dimilikinya. Anggaran terbesar yang diperoleh BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 14.601.302.325.50,-. Sedangkan Realisasi penyerapan anggaran terbesar pada tahun 2020 sebesar 87,13% sedangkan terendah ditahun 2018 sebesar 85.16 % yang disebabkan adanya Rasionalisasi Anggaran pada tahun tersebut. Perkembangan kinerja anggaran dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Penggunaan Anggaran BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran		
	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	14.601.302.325,50	12.722.514.754,00	87.13
2021	14.244.042.429,00	11.282.936.034,00	79,21
2022		13.745.745.101,00	
2023	33.064.401.374,00	30.422.355.033,00	92,01
2024	35.440.370.187,00	32.035.934.073,00	90,39
2025	17.957.346.099,00	16.263.756.077,00	90,57

Sumber Data: Badan Riset Dan Inovasi Daerah, Tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara

Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintahan dalam bidang riset, pengembangan, dan inovasi. Pelayanan ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani, sesuai visi dan misi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pelayanan BRIDA juga diukur dari kinerja, mutu layanan dan dampaknya, yang menargetkan pelayanan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung pembangunan daerah. Pelayanan BRIDA difokuskan pada peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID), pengelolaan data untuk kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti BRIN, Perguruan Tinggi, dan sektor swasta.

Capaian Kinerja diukur melalui indikator seperti keberhasilan inovasi, kualitas pelayanan publik, dan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kutai Kartanegara tahun sebelumnya terdapat target dan sasaran yang hendak dicapai. Berikut adalah realisasi target dan sasaran yang telah dicapai sebagaimana tergambar pada Tabel:

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan dokumen Kelitbangan yang dilaksanakan		100		Dokumen		7	15				3	14			93,33	93,33	93,33		
2	Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan		83,33		Prosentase		100	100				42,36	93,33			93,33	93,33	93,33		
3	Jumlah publikasi mandiri dan berkala yang diberikan atau dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan		100		Publikasi		200	200				200	200			100	100	100		

Ket:

1) Kolom (6) sampai dengan kolom (20) diisi data tahun 2020 s.d. 2024 (Target, Realisasi dan Rasio Capaian)

Setelah penyajian Tabel 5, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja targetnya belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17	18
Belanja Pendapatan	14.601.302.325,50	14.244.042.429,00		33.064.401.374,00	35.440.370.187,00	12.722.514.754,00	11.282.936.034,00	13.745.745.101,00	30.422.355.033,00	32.035.934.073,00	87,21	79,21		92,01	90,39	19.470.023.263,10	20.041.896.999,00
Belanja Operasi	13.800.934.325,50	14.001.868.429,00		25.445.957.309,00	34.379.372.187,00	11.961.061.154,00	11.131.889.214,00	13.701.009.101,00	23.009.709.033,00	31.353.844.073,00	79,5	79,5		90,43	91,20	17.525.626.450,10	91.157.512.575,00
Belanja Modal Pembiayaan	800.368.000,00	242.174.000,00		7.618.444.065,00	1.060.998.000,00	761.453.600,00	151.046.820,00	44.736.000,00	7.412.646.000,00	682.090.000,00	95,14	62,37		97,3	64,29	1.944.396.813,00	9.051.972.420,00

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
 **) diisikan dengan nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 ***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah (Per Program)
 Realisasi Anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terhadap Rencana APBD

Setelah penyajian Tabel 2.8, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Perbup Nomor 1 Tahun 2023 (Pasal 4 dan 5) dan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BRIDA, kelompok sasaran layanan BRIDA adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Kelompok sasaran ini mencakup:

a. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Deskripsi: Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna utama hasil riset BRIDA untuk perumusan kebijakan berbasis bukti. BRIDA menyediakan data dan rekomendasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Contoh Pelayanan: Kajian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), analisis dampak Ibu Kota Nusantara (IKN), dan rekomendasi kebijakan tata kelola pemerintahan.
- Capaian: BRIDA mendukung penyusunan APBD dengan data empiris, termasuk kajian kelayakan industri pakan ternak dan pemetaan infrastruktur.

b. Masyarakat Umum:

- Deskripsi: Masyarakat Kukar, termasuk komunitas lokal, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat adat, sebagai penerima manfaat tidak langsung dari inovasi dan riset BRIDA.

Pelayanan ini mencakup pengembangan solusi untuk isu strategis seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

- Contoh Pelayanan: Inisiasi masyarakat peduli indikasi geografis untuk produk lokal seperti Kopi Prangat, serta kajian sosial untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- Capaian: BRIDA menargetkan peningkatan kesejahteraan melalui inovasi seperti pengembangan BUMDes dan solusi teknologi untuk kebutuhan masyarakat.

c. Pelaku Usaha dan UMKM:

- Deskripsi: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor swasta sebagai penerima manfaat dari inovasi teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang difasilitasi BRIDA.
- Contoh Pelayanan: Sosialisasi dan pendaftaran HAKI untuk produk lokal, serta kajian potensi ekonomi untuk pengembangan industri seperti perikanan dan agroindustri.
- Capaian: BRIDA bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk pendaftaran HAKI.

d. Instansi Pendidikan dan Penelitian:

- Deskripsi: Universitas, sekolah, dan lembaga penelitian sebagai mitra dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi, mulai dari tingkat sekolah hingga level tinggi.
- Contoh Pelayanan: Kolaborasi dengan Universitas untuk analisis dampak IKN.
- Capaian: BRIDA menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas SDM Iptek dan seminar bersama universitas untuk memperkuat budaya riset.

Berikut uraian beberapa kerjasama sebagai contoh aspek tambahan yang relevan dengan kondisi daerah Kukar:

Tabel 7. Mitra Kerjasama BRIDA Kabupten Kutai Kartanegara

No	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Ruang Lingkup	Dasar Kerja Sama
A. Kolaborasi Perangkat Daerah				
1	Bappeda	Sinkronisasi Data	Penyediaan Data kajian zonasi wilayah dan dampak IKN untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Bappeda	Kesepakatan Bersama
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dukungan Pelayanan	Pengembangan UMKM dan perlindungan HAKI produk lokal	Kesepakatan Bersama
3	Dinas Sosial dan Kesbangpol	Dukungan Kajian Sosial	Analisis kerawanan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Kesepakatan Bersama

B. Dukungan BUMD				
1	PDAM Tirta Mahakam	Penyediaan Data Operasional	Kajian terkait penyediaan air bersih, salah satu isu strategis	Perjanjian Kerja Sama
2	BUMD Lainnya	Investasi Ekonomi	- Pengembangan ekonomi lokal, seperti analisis kelayakan industri pakan ternak - Kajian efisiensi BUMD untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor BUMD • Penerapan inovasi sektor publik - Prototipe inovasi layanan	Perjanjian Kerja Sama
C. Kerja Sama Daerah				
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Pendampingan	•Penyusunan Rencana Induk Iptek dan pemetaan ekosistem inovasi	Kesepakatan Bersama
2	BRIDA Provinsi Kaltim	Pendampingan	•Sinkronisasi RPJMN-D dan kajian isu strategis seperti dampak IKN	Kesepakatan Bersama
3	Kanwil Kemenkumham Kaltim	Dukungan Teknis	• Untuk pendaftaran HAKI produk lokal	Kesepakatan Bersama
4	Dunia Usaha	Pengembangan inovasi	- Hilirisasi hasil riset - Model bisnis / pilot project	MoU
5	Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneliti Lainnya (Universitas Mulawarman, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas 45, Unikarta)	Penelitian Bersama	- Kajian sosial budaya, ekonomi, tata Kelola pemerintahan dan teknologi - Workshop kapasitas SDM IPTEK dan seminar bersama universitas	MoU dan PKS

Sumber data : BRIDA Kabupten Kutai Kartanegara

2.2. Permasalahan Pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambaran permasalahan terkait pelayanan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang bersifat umum maupun yang sering menjadi sorotan masyarakat atau Pemerintah Daerah:

1. Masalah dalam Perencanaan dan SDM Riset;

Terbatasnya sumber daya kelitbangan khususnya jumlah tenaga peneliti, perencana, analis, dan tenaga pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu. Hal ini menjadi hambatan bagi BRIDA untuk menjalankan fungsi riset dan inovasi secara optimal dalam jajaran pemerintah daerah.
2. Pengelolaan Data dan Pelayanan yang harus ditingkatkan;

Dalam pelaksanaan evaluasi internal BRIDA Kukar juga terdapat isu-isu penting dalam:

 - Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
 - Fasilitasi serta evaluasi kegiatan pendataan dan kajian regulasi
 - Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kajian

Ketiga hal ini penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas output riset/inovasi yang dihasilkan.

3. Kebutuhan Perbaikan Mekanisme Pelayanan Publik Secara Umum;

Meskipun ini bukan masalah khusus hanya pada BRIDA, tetapi dalam konteks pelaksanaan pelayanan publik di Kukar, terdapat tren peningkatan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan bahwa penanganan dan tindak lanjut pengaduan yang belum optimal, sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat sistem monitoring pelaporan, supaya hasil kajiannya tepat waktu, relevan, dan mudah diakses publik.

4. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan;

Hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja lembaga penelitian & inovasi:

- Pengawasan kepatuhan standar pelayanan publik yang perlu diperkuat untuk mendukung pemetaan indikasi masalah pelayanan publik melalui data terukur
- Integrasi layanan agar lebih efisien dan responsif
- Penyusunan standar operasional prosedur yang konsisten antar instansi

Kesimpulan dari permasalahan yang mempengaruhi pelayanan BRIDA Kukar mencakup:

1. Keterbatasan SDM riset dan analis yang mumpuni untuk mengolah data dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.
2. Sistem pengelolaan data dan monitoring output inovasi yang butuh didorong lebih kuat, termasuk keterlibatan masyarakat.

2.3 Isu Strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada bagian faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah akan ditinjau kembali dari: Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/ tahapan perencanaan. Isu Strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut penentuan isu-isu strategis yang ditinjau dari:

Tabel 2.1. Isu Strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara

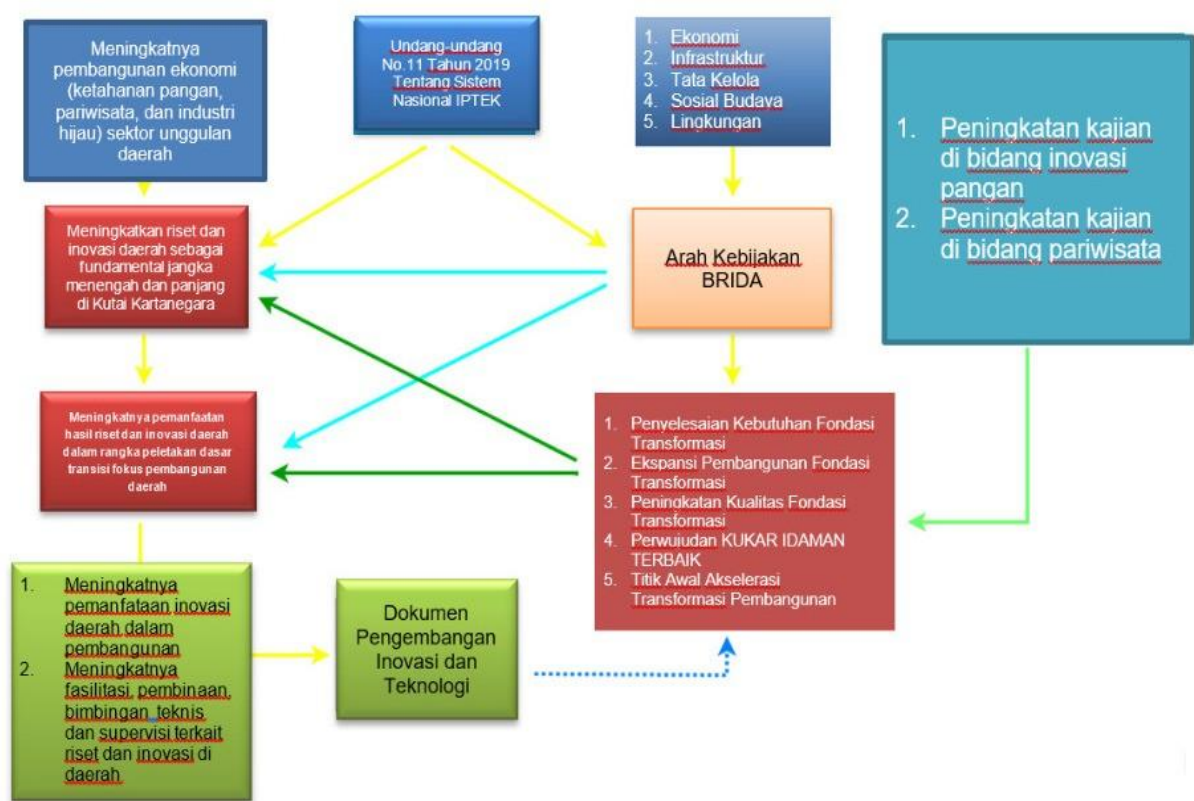
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ekosistem Riset dan Inovasi yang belum dioptimalkan (Kerja sama pentahelix) 2. Basis Data pembangunan daerah (data Sektoral, big data, SDGs Indikator Daerah) 3. Inovasi pelayanan publik & tata kelola pemerintahan	1. Jumlah peneliti yang terbatas 2. Sarana dan prasarana riset yang belum memadai 3. Kurangnya dukungan regulasi 4. Pengendalian dan evaluasi hasil riset yang belum optimal	Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta	1. Kompetisi global 2. Berbasis inovasi dan teknologi, revolusi industri 4.0, green economy 3. Global trend open data & smart governance 4. Good governance, digital government, inklusivitas	1. Perpres No. 78/2021 tentang BRIDA; RPJMN; dorong evidence based policy, digitalisasi riset; target TKDN & inovasi daerah 2. Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019), digitalisasi SPBE, penguatan SIPD Kemendagri 3. Agenda Reformasi Birokrasi Tematik, penguatan inovasi daerah oleh Kemendagri & Kemen PAN RB	1. Posisi Kukar sebagai mitra IKN, Kebutuhan riset sektor SDA & pariwisata, isu lingkungan akibat tambang & sawit, tuntutan inovasi layanan publik 2. Kebutuhan data pembangunan Kukar untuk perencanaan terintegrasi dengan IKN dan provinsi 3. Persaingan antar daerah dalam inovasi pelayanan publik, tuntutan peningkatan IPKD & indeks inovasi daerah	1. Perpindahan IKN mendorong kebutuhan riset di Kaltim; Dinamika industri ekstraktif ke ekonomi hijau; tuntutan digitalisasi 2. Tuntutan keterbukaan data, Satu Data Indonesia, transformasi digital 3. Tuntutan pelayanan publik adaptif, inklusif, berbasis teknologi 4. Penataan Wilayah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan adanya riset dan inovasi yang terintegrasi sehingga potensi-potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Hasil riset dan inovasi yang terintegrasi diharapkan dapat diterapkan untuk kehidupan masyarakat dan kepentingan publik. Untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dengan pembangunan maka dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya riset yang optimal dan terukur. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah.

BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan **“Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ”**. Disamping itu juga mendukung pencapaian Visi dan Misi serta 17 program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.



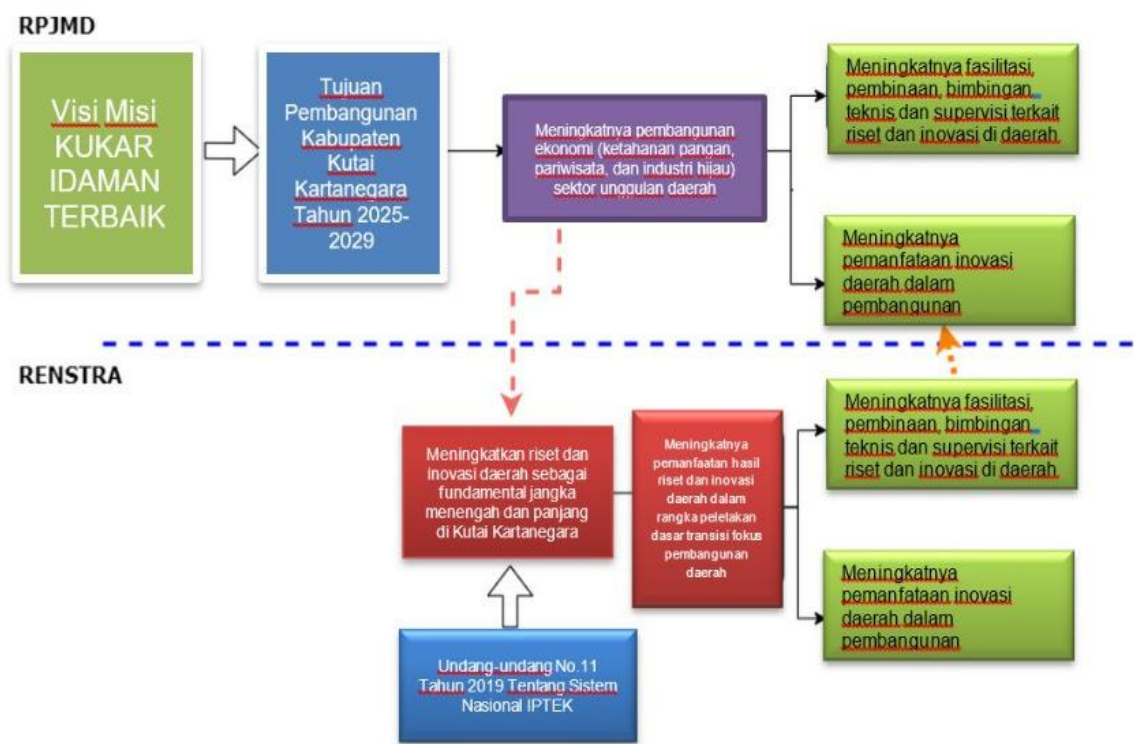
Gambar 3. 1 Konsep Renstra BRIDA

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Di samping sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dapat juga menjadi instrumen untuk mencapai hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh sebuah organisasi. Untuk mengukur pencapaian masing-masing sasaran maka dibuatlah indikator kinerja sasaran, yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat capaian sasaran setiap tahunnya selama periode perencanaan.

Sasaran yang ingin dicapai BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Misi ke 3 Kukar Idaman Terbaik yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara** sampai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 2. Meningkatnya Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Berkarakter



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra BRIDA

Berikut ini adalah Tabel 3.3 yang akan menggambarkan teknik merumuskan tujuan dan sasaran beserta dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, dimana dari uraian pada tabel 3.3 ini diketahui bahwa tujuan BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **“Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti”**, dengan indikator tujuan, yaitu:

1. Indeks Inovasi Daerah
2. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka BRIDA menetapkan sasaran strategis, yaitu **“Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah”**, dengan indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan
2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
NSPK : 1. Permenristekdikti 20/2018 Tentang Pelaksanaan Penelitian 2. Permendagri 104/2018 Tentang Indeks Inovasi Daerah Sasaran RPJMD: 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan Riset, Inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	58,59	60,61	61,1	62,24	63,24	64,58	65,59	
			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)	95,42	88,38	69,75	69,85	69,95	70,15	70,25	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (Persentase)	65	70	75	80	85	90	95	
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	67,03	77	77,37	77,85	78,34	78,9	79,41	

Dalam upaya pencapaian masing-masing sasaran yang telah diurai di atas, jika dilihat keterkaitan antara sasaran dengan program dimungkinkan satu sasaran memiliki program yang juga merupakan program dari sasaran lainnya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk satu sasaran akan memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran yang lain.

a. Infrastruktur teknologi yang terbatas

- Deskripsi: Infrastruktur teknologi yang terbatas, seperti akses internet di wilayah pedesaan dan fasilitas penelitian, menghambat pelaksanaan riset berbasis digital dan pemanfaatan teknologi seperti citra satelit atau nano teknologi;
- Regulasi Terkait: Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menekankan pentingnya infrastruktur untuk ekosistem riset, namun implementasi di daerah seperti Kukar masih terbatas karena kendala geografis dan anggaran;
- Dampak pada Pelayanan: Membatasi kemampuan BRIDA untuk menghasilkan data real-time dan inovasi teknologi tinggi, seperti pemanfaatan citra satelit untuk pemetaan kebutuhan infrastruktur;
- Tahun yang akan datang: Kajian pemetaan kebutuhan infrastruktur BRIDA oleh BRIN menunjukkan perlunya investasi tambahan untuk laboratorium dan konektivitas digital di Kukar.

b. Literasi Digital Masyarakat yang Rendah:

- Deskripsi: Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di kecamatan terpencil, menghambat adopsi inovasi berbasis teknologi digital yang dikembangkan BRIDA, seperti aplikasi pelayanan publik atau platform inovasi;
- Regulasi Terkait: Perbup Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 77 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah mendorong sosialisasi budaya inovasi, namun tantangan ini tetap signifikan;
- Dampak pada Pelayanan: Mengurangi efektivitas diseminasi hasil riset dan inovasi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha;
- Tahun yang akan datang: BRIDA menyelenggarakan sosialisasi literasi digital untuk ASN dan masyarakat, namun cakupan masih terbatas di wilayah perkotaan.

c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM):

- Deskripsi: Kapasitas SDM BRIDA, termasuk peneliti dan staf teknis, masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan riset berkualitas tinggi dan inovasi yang kompetitif. Kurangnya jumlah peneliti dan pelatihan khusus menjadi kendala.
- Regulasi Terkait: Perjanjian Kinerja menargetkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, namun anggaran pelatihan masih terbatas dibandingkan kebutuhan.
- Dampak pada Pelayanan: Membatasi kemampuan BRIDA untuk menghasilkan kajian kompleks, seperti analisis dampak IKN atau pengembangan teknologi nano.
- Tahun yang akan datang: BRIDA bekerja sama dengan BRIN dan pihak lain untuk pelatihan SDM IPTek, namun jumlah peserta terbatas karena keterbatasan anggaran.

d. Penurunan PAD dari Sektor Migas:

- Deskripsi: Penurunan PAD dari sektor migas dan gas alam memengaruhi anggaran BRIDA, meskipun telah meningkat pada tahun 2023;
- Regulasi Terkait: Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2024 tentang APBD 2025 mengalokasikan dana untuk riset, namun prioritas anggaran lebih banyak dialihkan ke infrastruktur dan pelayanan dasar;
- Dampak pada Pelayanan: Membatasi skala proyek riset dan inovasi, seperti pengembangan teknologi baru atau ekspansi ke kecamatan terpencil;
- Tahun yang akan datang: BRIDA mengalihkan fokus pada kajian peningkatan PAD dari sektor non-migas, seperti agroindustri dan perikanan.

e. Koordinasi Antar Instansi:

- Deskripsi: Kurangnya sinergi antar-OPD dan dengan pihak eksternal (misalnya, BRIN atau universitas) menghambat integrasi data riset untuk kebijakan berbasis bukti.
- Regulasi Terkait: Perjanjian Kinerja menekankan koordinasi dengan OPD pengampu indikator kinerja, namun implementasi masih menghadapi kendala birokrasi.
- Dampak pada Pelayanan: Menyebabkan duplikasi kegiatan atau ketidaksesuaian prioritas antar-OPD.
- Tahun yang akan datang: BRIDA mengadakan diskusi lintas-OPD, namun koordinasi dengan kecamatan masih terbatas.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Secara garis besar, strategi diarahkan kepada penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah berkelanjutan, dimana BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai fasilitator dan kolaborator.

Peluang Pengembangan Pelayanan BRIDA

Peluang pengembangan pelayanan BRIDA di Kukar mencakup potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya pada pembangunan daerah, sejalan dengan visi KUKAR IDAMAN TERBAIK.

a. Peningkatan Anggaran dan Dukungan Pemerintah:

- Deskripsi: Peningkatan anggaran BRIDA menunjukkan komitmen Bupati Kukar terhadap riset dan inovasi. Dukungan ini berlanjut dengan alokasi anggaran dalam Perda Nomor 17 Tahun 2024 tentang APBD.
- Peluang: Memungkinkan BRIDA untuk memperluas skala riset;
- Kontek yang akan datang: Alokasi anggaran mendukung penyusunan peta jalan riset dan inovasi 2025-2029, yang mencakup enam elemen ekosistem riset (kebijakan, infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan, budaya riset, dan penyelarasan global).

b. Kolaborasi dengan BRIN dan Pihak Lain:

- Deskripsi: Kerja sama dengan BRIN, Universitas Proklamasi 45, Universitas Mulawarman, dan Universitas Gadjah Mada memberikan akses ke keahlian, teknologi, dan pendanaan tambahan untuk riset;
- Regulasi Terkait: Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan Nota Kesepakatan Sinergi BRIN-Pemkab Kukar mendukung pendampingan BRIN untuk BRIDA, termasuk konsultasi dan kajian bersama;
- Peluang: Meningkatkan kualitas riset melalui pendampingan BRIN;
- Kontek yang akan datang: BRIDA menyelenggarakan workshop SDM Iptek dan seminar dengan universitas untuk memperkuat budaya riset dan inovasi.

c. Adopsi Teknologi Digital:

- Deskripsi: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang untuk mengembangkan pelayanan berbasis digital, seperti platform online untuk kolaborasi peneliti dan diseminasi hasil riset.
- Regulasi Terkait: Perbup Nomor 24 Tahun 2025 mendorong inovasi digital untuk pelayanan publik.
- Peluang: Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan;
- Kontek yang akan datang: BRIDA menargetkan pengembangan platform digital untuk mendukung Pekan Inovasi dan Kreativitas, dengan fokus pada pelayanan publik berbasis teknologi.

d. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID):

- Deskripsi: Capaian IID Kukar pada 2023 mencapai 58,53 (predikat Inovatif), mendekati predikat Sangat Inovatif (60,00-100,00), memberikan momentum untuk memperkuat pelayanan inovasi;
- Regulasi Terkait: Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan kriteria IID yang menjadi panduan BRIDA.
- Peluang: Meningkatkan jumlah inovasi yang masuk nominasi nasional dan provinsi.
- Kontek yang akan datang: BRIDA menargetkan IID melalui gerakan "**Satu Instansi Satu Inovasi**" untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

e. Isu Strategis Daerah:

- Deskripsi: Isu strategis seperti pangan, pariwisata, industri hijau, pengelolaan sampah, air bersih, potensi perikanan, dan *best practice* BUMDes memberikan peluang untuk mengembangkan solusi berbasis riset.
- Regulasi Terkait: Renja BRIDA menetapkan prioritas riset untuk isu strategis ini, sejalan dengan visi KUKAR IDAMAN TERBAIK.
- Peluang: Menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
- Konteks yang akan datang: BRIDA melakukan kajian kelayakan pangan, pariwisata, industri hijau seperti industri pakan ternak dan pengelolaan air bersih.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra BRIDA

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penyelesaian Kebutuhan Fondasi Transformasi	Ekspansi Pembangunan Fondasi Transformasi	Peningkatan Kualitas Fondasi Transformasi	Perwujudan KUKAR IDAMAN TERBAIK	Titik Awal Akselerasi Transformasi Pembangunan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pembangunan sampai dengan 2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BRIDA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BRIDA	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta sesuai pedoman Peraturan BRIN 9/2024	Penyusunan sistem perencanaan penganggaran terpadu	Peningkatan pembiayaan Kajian, Riset dan Inovasi Daerah secara terencana dan berkelanjutan	
2	Peningkatan Kapasitas BRIDA dalam pelaksanaan kajian dan Inovasi PP 12/2017	Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik	Penguatan kapasitas SDM pendukung pelaksanaan Kajian, Riset dan Inovasi	
3	Pemantauan hasil kajian yang termanfaatkan secara optimal	Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja	Penyelarasan regulasi internal dan penyesuaian SOP dalam pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	
4	Peningkatan akses dan transparansi layanan publik di bidang Riset dan Inovasi Daerah	Digitalisasi layanan publik	Transformasi digital dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data, kajian, dan diseminasi hasil riset	
5	Pengembangan kolaborasi riset, pemanfaatan hasil inovasi, serta penerapan prinsip adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Penguatan sinergi antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya	

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh BRIDA (Badan Riset Dan Inovasi Daerah) untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Penelitian dan Pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Daerah;
2. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas Penelitian dan Pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Inovasi dan Tehnologi;
4. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang Sosial dan Kependudukan;
5. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas penghimpunan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data, informasi, serta publikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perumusan kebijakan daerah;
6. Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya internal untuk mendukung tupoksi institusi, serta menyelenggarakan koordinasi lintas unit/ satuan kerja.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pembentukan Perda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Penguatan komitmen pemangku kepentingan penetapan Perda penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah
			Peningkatan desiminasi dan pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, secaraintensif
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Riset sebagai layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan penyelesaian pembangunan berkelanjutan	Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha
			Peningkatan Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas hasil Riset dan Inovasi
	Meningkatnya Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta bimtek berbasis spesifik/tematik.	Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
			Melaksanakan Kerja sama Riset dan Inovasi dengan lembaga/ intitusi/yayasan

Program Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan Misi Program
Dedikasi :

- a. Program Penelitian dan Pengembangan pada Misi 1:
 - 1) Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;
 - 2) Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
 - 3) Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik;
 - 4) Program Etam Sejahtera
- b. Program Penelitian dan Pengembangan pada Misi 2:
 - 1) Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh
 - 2) Program Kredit Kukar Idaman Terbaik
 - 3) Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah
 - 4) Program Stimulus Komunitas Kreatif
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Misi 3:
 - 1) Program Pelayanan Publik Cerdas;
 - 2) Program ASN Kukar Terbaik
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Misi 4:
 - 1) Program RT Ku-Terbaik;
 - 2) Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku
 - 3) Program Jaga Lingkungan Lestari
- e. Program Penelitian dan Pengembangan Misi 5 :
 - 1) Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik;
 - 2) Program Internet Desa Gratis
 - 3) Program Permukiman Idaman Terbaik

Produk Unggulan Daerah

Misi	Produk Unggulan	Ekosistem Riset
Misi 1: Terbaik Dalam Mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	- Dinas Pertanian - Dinas Sosial - Dinas Pendidikan - Dinas Perdagangan
	Program Etam Sejahtera	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Ketenagakerjaan
Misi 2: Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Fondasi Ekonomi Baru Non Ekstraktif	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Stimulus Komunitas Kreatif	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Misi 4: Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku	Dinas Sosial
Misi 5: Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Dasar Pembangunan Kewilayahan Yang Berkeadilan	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Sosial

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program BRIDA

Rencana Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberadaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sangat penting agar sebuah Perencanaan Strategis dapat berjalan optimal sehingga sasaran dan tujuan selama 5 tahun kedepan dapat diwujudkan.

Terkait dengan Rancangan Akhir Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut diatas, BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rutin),
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Strategis) terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
3. Program Riset dan Inovasi, dengan (2) kegiatan:
 - a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - b. Inovasi dan inovasi

4.2 Uraian Kegiatan BRIDA

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian program dan sasaran yang dirumuskan. Penyusunan kegiatan dan sub kegiatan mempertimbangkan tingkat urgensi dan efektivitasnya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Adapun rencana Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penelitian dan Pengembangan
 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan
 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 4. Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
- c. Program Riset dan Inovasi
 1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 2. Inovasi dan Inovasi

4.3 Uraian Sub Kegiatan BRIDA

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Sub Kegiatan dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki 5 (lima) Sub Kegiatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki 7 (tujuh) Sub Kegiatan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan

Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan berdasarkan kinerja (hasil/outcome dan keluaran/output) yang akan dihasilkan/dicapai. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Setiap kinerja akan diukur dengan indikator. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, kelompok sasaran kegiatan harus dirumuskan secara spesifik dan rinci agar memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan dimaksud.

4.4 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunandaerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) menetapkan serangkaian kegiatan prioritas yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kegiatan strategis dan kegiatan rutin, yang secara sinergis diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) BRIDA serta memperkuat kontribusi lembaga dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

Kegiatan strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran utama BRIDA, yaitu meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Beberapa bentuk kegiatan yang masuk dalam kategori strategis antara lain penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, inovasi teknologi, sosial, serta kependudukan.. BRIDA juga mengembangkan inovasi melalui riset yang berfokus pada fondasi transformasi ketahanan pangan, pariwisata, dan industri hijau sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan strategis juga mencakup publikasi dan diseminasi ilmiah melalui penerbitan jurnal, penyelenggaraan seminar, serta lomba karya tulis ilmiah remaja.

Selain itu, untuk merespon dinamika isu aktual, BRIDA melaksanakan kajian mandiri dan riset cepat. Kajian mandiri difokuskan pada isu-isu strategis daerah seperti lingkungan, sosial,

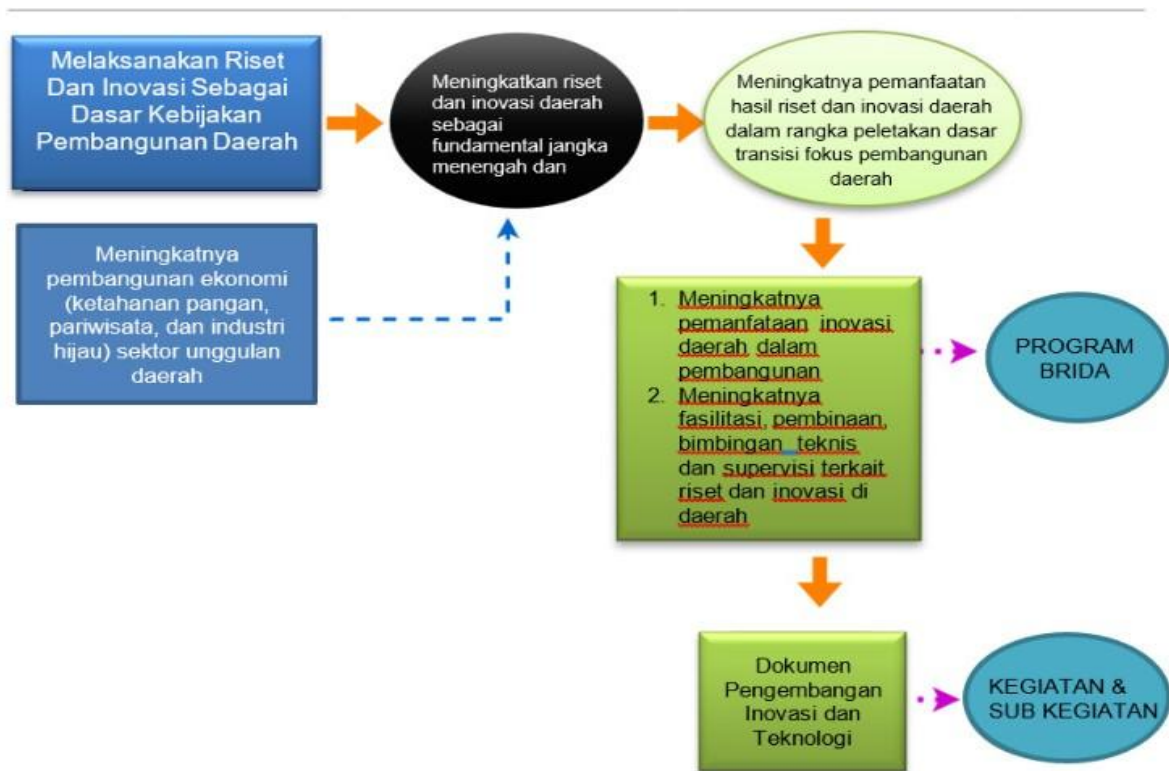
dan ekonomi, sementara riset cepat dilakukan sebagai respon atas permasalahan mendesak yang membutuhkan rekomendasi kebijakan segera. Hasil dari kajian maupun riset cepat ini diwujudkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, kegiatan rutin berfungsi sebagai pendukung operasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Kegiatan ini meliputi pengelolaan administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan laporan capaian kinerja, serta pengelolaan keuangan. Di samping itu, peningkatan kapasitas ASN juga menjadi bagian penting dari kegiatan rutin melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis penulisan karya ilmiah, pelatihan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kemampuan teknologi informasi dan bahasa asing. Kegiatan rutin juga mencakup promosi dan kerja sama, seperti pengembangan website BRIDA, partisipasi dalam pameran, serta pelaksanaan rapat koordinasi penelitian dan pengembangan antar-OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan strategis dan rutin tersebut, pendanaan BRIDA tidak hanya bersumber dari pagu APBD, tetapi juga dioptimalkan melalui berbagai sumber alternatif, seperti Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten, Pokir DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta potensi kerjasama dengan pihak ketiga baik dari kalangan akademisi, swasta, maupun lembaga donor. Dengan kombinasi pendanaan tersebut, BRIDA berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program dan memastikan setiap kegiatan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan kegiatan strategis dan rutin yang terarah, BRIDA Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat berperan optimal sebagai motor penggerak riset dan inovasi daerah, memperkuat kualitas kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan, serta mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub KegiatanRenstra BRIDA

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					20.991.849.142,00		23.503.869.110,48		24.911.301.884,97		27.775.105.554,64		30.048.411.157,03	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.586.849.142,00		13.884.316.355,48		13.884.316.355,97		13.884.316.355,64		13.884.316.356,03	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,03	67,87	68,71	12.586.849.142,00	69,55	13.884.316.355,48	70,39	13.884.316.355,97	71,23	13.884.316.355,64	72,07	13.884.316.356,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					7.205.000.000,00		7.214.664.570,00		8.269.489.149,00		10.418.091.904,00		12.123.071.101,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (%)	90,39	88,38	69,75	7.205.000.000,00	69,85	7.214.664.570,00	69,95	8.269.489.149,00	70,15	10.418.091.904,00	70,25	12.123.071.101,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (%)	90,39	88,38	69,75		69,85		69,95		70,15		70,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)	90,39	88,38	69,75		69,85		69,95		70,15		70,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.200.000.000,00		2.404.888.185,00		2.757.496.380,00		3.472.697.295,00		4.041.023.700,00	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		90,69	90,79	1.050.000.000,00	90,89	2.015.003.066,00	90,99	2.300.776.449,00	91,09	2.960.000.000,00	91,19	3.376.023.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	90,69	90,79	90,89	150.000.000,00	90,99	389.885.119,00	91,09	456.719.931,00	91,19	512.697.295,00	91,29	665.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					20.991.849.142,00		23.503.869.110,48		24.911.301.884,97		27.775.105.554,64		30.048.411.157,03	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah							
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan Berkarakter	Meningkatnya kualitas kebijakan dan daya saing daerah melalui penyelenggaraan riset, inovasi, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti				Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah			Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
					Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0004 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0005 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	5.05.02.2.01.0006 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0007 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0008 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
					Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0009 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0010 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0011 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
				Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
				Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Jumlah hasil riset dan inovasi yang termanfaatkan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah			Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi riset dan inovasi daerah sesuai target	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB- KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE- LINE TA- HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET- ERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU	TAR- GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				20.991.849.142,00		23.503.869.110,48		24.911.301.884,97		27.775.105.554,64		30.048.411.157,03		
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.586.849.142,00		13.884.316.355,48		13.884.316.355,97		13.884.316.355,64		13.884.316.356,03		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakel- ola Kinerja Perangkat Daerah yang Efek- tif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,03	68,71	12.586.849.142,00	69,55	13.884.316.355,48	70,39	13.884.316.355,97	71,23	13.884.316.355,64	72,07	13.884.316.356,03	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Ino- vasi Daerah	
5.05.01.2.01 - Perencanaan, Pengang- garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Dae- rah (Dokumen)	0	90	350.000.000,00	90	750.000.000,00	90	750.000.000,00	90	750.000.000,00	90	750.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	76,32	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	89,09	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Ca- paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	99,22	90		90		90		90		90			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Doku- men Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		90		90		90		90			90
5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Doku- men Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	89,09	90	150.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00	90	450.000.000,00		
5.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	99,22	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00		
5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	76,32	90	100.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
5.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00		
5.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00		
5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.301.598.055,00		11.809.316.355,48		11.809.316.355,97		11.809.316.355,64		11.809.316.356,03		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.090	1.284	11.301.598.055,00	1.284	11.809.316.355,48	1.284	11.809.316.355,97	1.284	11.809.316.355,64	1.284	11.809.316.356,03		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	85,78	90		90		90		90		90			
5.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.056.598.055,00		11.529.316.355,48		11.529.316.355,97		11.529.316.355,64		11.529.316.356,03		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.090	1.284	11.056.598.055,00	1.284	11.529.316.355,48	1.284	11.529.316.355,97	1.284	11.529.316.355,64	1.284	11.529.316.356,03		
5.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00		

5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				170.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	85,78	90	170.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00		
5.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	90	25.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00	90	50.000.000,00		
5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				83.626.800,00		108.626.800,00		108.626.800,00		108.626.800,00		108.626.800,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	90	83.626.800,00	90	108.626.800,00	90	108.626.800,00	90	108.626.800,00	90	108.626.800,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	99,95	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	90		90		90		90		90			
5.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00		
5.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				33.626.800,00		33.626.800,00		33.626.800,00		33.626.800,00		33.626.800,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	90	33.626.800,00	90	33.626.800,00	90	33.626.800,00	90	33.626.800,00	90	33.626.800,00		
5.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	99,95	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00		
5.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	0	0,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00	90	25.000.000,00		
5.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.900.420,00		180.000.000,00		224.000.000,00		180.000.000,00		224.000.000,00		
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70	70	32.900.420,00	105	180.000.000,00	105	224.000.000,00	105	180.000.000,00	105	224.000.000,00		

	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	303	0		0		105		0		105			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0		20		0		20		0			
5.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		144.000.000,00		0,00		144.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	303	0	0,00	0	0,00	105	144.000.000,00	0	0,00	105	144.000.000,00		
5.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	0	0,00	20	100.000.000,00	0	0,00	20	100.000.000,00	0	0,00		
5.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				32.900.420,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	70	70	32.900.420,00	105	80.000.000,00	105	80.000.000,00	105	80.000.000,00	105	80.000.000,00		
5.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				307.359.308,00		451.455.237,00		451.455.237,00		451.455.237,00		451.455.237,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	60	307.359.308,00	70	451.455.237,00	70	451.455.237,00	70	451.455.237,00	70	451.455.237,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	80	80		85		85		85		85			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70	70		80		80		80		80			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50	50		80		80		80		80			
5.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.248.300,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70	70	68.248.300,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		
5.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.548.503,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	80	80	97.548.503,00	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00	85	100.000.000,00		
5.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				13.080.930,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50	50	13.080.930,00	80	30.200.000,00	80	30.200.000,00	80	30.200.000,00	80	30.200.000,00		

5.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				33.962.575,00		45.883.637,00		45.883.637,00		45.883.637,00		45.883.637,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	60	33.962.575,00	70	45.883.637,00	70	45.883.637,00	70	45.883.637,00	70	45.883.637,00		
5.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.147.400,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50	69.147.400,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
5.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.371.600,00		25.371.600,00		25.371.600,00		25.371.600,00		25.371.600,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	25.371.600,00	100	25.371.600,00	100	25.371.600,00	100	25.371.600,00	100	25.371.600,00		
5.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.455.040,00		57.321.600,00		57.321.600,00		57.321.600,00		57.321.600,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	30	85.455.040,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		0			
5.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

5.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				85.455.040,00		57.321.600,00		57.321.600,00		57.321.600,00		57.321.600,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	30	85.455.040,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00	20	57.321.600,00		
5.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.439.519,00		227.395.728,00		227.395.728,00		227.395.728,00		227.395.728,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	116.439.519,00	12	227.395.728,00	12	227.395.728,00	12	227.395.728,00	12	227.395.728,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000,00		58.915.728,00		58.915.728,00		58.915.728,00		58.915.728,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000,00	12	58.915.728,00	12	58.915.728,00	12	58.915.728,00	12	58.915.728,00		
5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				51.439.519,00		168.480.000,00		168.480.000,00		168.480.000,00		168.480.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	51.439.519,00	12	168.480.000,00	12	168.480.000,00	12	168.480.000,00	12	168.480.000,00		
5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				309.470.000,00		300.200.635,00		256.200.635,00		300.200.635,00		256.200.635,00		
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37	309.470.000,00	35	300.200.635,00	30	256.200.635,00	35	300.200.635,00	30	256.200.635,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67,03	84		87		91		93		95			
5.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				239.470.000,00		230.200.635,00		186.200.635,00		230.200.635,00		186.200.635,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37	239.470.000,00	35	230.200.635,00	30	186.200.635,00	35	230.200.635,00	30	186.200.635,00			
5.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
5.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	67,03	84	70.000.000,00	87	70.000.000,00	91	70.000.000,00	93	70.000.000,00	95	70.000.000,00			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				7.205.000.000,00		7.214.664.570,00		8.269.489.149,00		10.418.091.904,00		12.123.071.101,00			
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (%)	90,39	69,75	7.205.000.000,00	69,85	7.214.664.570,00	69,95	8.269.489.149,00	70,15	10.418.091.904,00	70,25	12.123.071.101,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah		
	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)	90,39	69,75		69,85		69,95		70,15		70,25				
	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (%)	90,39	69,75		69,85		69,95		70,15		70,25				
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				2.025.000.000,00		2.168.210.325,00		2.669.305.512,00		3.218.020.899,00		3.809.489.601,00			
Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	67,03	90	2.025.000.000,00	0	2.168.210.325,00	90	2.669.305.512,00	90	3.218.020.899,00	90	3.809.489.601,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90				
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90				

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	67,03	0		0		0		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	67,03	90		90		90		90		90			

5.05.02.2.01.0001 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				0,00		207.419.614,00		212.000.000,00		212.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	67,03	0	0,00	90	207.419.614,00	90	212.000.000,00	90	212.000.000,00	90	275.000.000,00		
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				100.000.000,00		207.419.614,00		190.604.227,00		212.350.628,00		255.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	67,03	90	100.000.000,00	90	207.419.614,00	90	190.604.227,00	90	212.350.628,00	90	255.500.000,00		
5.05.02.2.01.0003 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				850.000.000,00		178.695.349,00		190.604.227,00		212.350.628,00		255.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	67,03	90	850.000.000,00	90	178.695.349,00	90	190.604.227,00	90	212.350.628,00	90	255.000.000,00		
5.05.02.2.01.0004 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				0,00		128.695.349,00		214.496.770,00		195.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	67,03	0	0,00	90	128.695.349,00	90	214.496.770,00	90	195.000.000,00	90	250.000.000,00		
5.05.02.2.01.0005 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				100.000.000,00		0,00		164.496.770,00		178.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	67,03	90	100.000.000,00	0	0,00	90	164.496.770,00	90	178.000.000,00	90	250.000.000,00		
5.05.02.2.01.0006 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				0,00		0,00		0,00		124.701.256,00		412.350.628,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	67,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	124.701.256,00	90	412.350.628,00		
5.05.02.2.01.0007 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				375.000.000,00		160.325.880,00		194.567.847,00		231.513.155,00		250.940.767,00		

Terlaksannya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	67,03	90	375.000.000,00	90	160.325.880,00	90	194.567.847,00	90	231.513.155,00	90	250.940.767,00		
5.05.02.2.01.0008 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				0,00		163.373.359,00		194.567.847,00		231.513.154,00		250.940.767,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	67,03	0	0,00	90	163.373.359,00	90	194.567.847,00	90	231.513.154,00	90	250.940.767,00		
5.05.02.2.01.0009 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				125.000.000,00		160.325.880,00		194.567.847,00		231.513.154,00		250.940.767,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	67,03	90	125.000.000,00	90	160.325.880,00	90	194.567.847,00	90	231.513.154,00	90	250.940.767,00		
5.05.02.2.01.0010 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				0,00		160.325.880,00		194.567.847,00		231.513.154,00		250.940.767,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	67,03	0	0,00	90	160.325.880,00	90	194.567.847,00	90	231.513.154,00	90	250.940.767,00		
5.05.02.2.01.0011 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				100.000.000,00		160.325.880,00		183.766.426,00		231.513.154,00		269.401.581,00		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	67,03	90	100.000.000,00	90	160.325.880,00	90	183.766.426,00	90	231.513.154,00	90	269.401.581,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				125.000.000,00		160.325.880,00		183.766.426,00		231.513.154,00		269.401.581,00		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	67,03	90	125.000.000,00	90	160.325.880,00	90	183.766.426,00	90	231.513.154,00	90	269.401.581,00		
5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				250.000.000,00		160.325.880,00		183.766.426,00		231.513.154,00		269.401.581,00		
Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	67,03	90	250.000.000,00	90	160.325.880,00	90	183.766.426,00	90	231.513.154,00	90	269.401.581,00		
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				0,00		160.325.880,00		183.766.426,00		231.513.154,00		30.269.581,00		

Terlaksananya Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	67,03	0	0,00	90	160.325.880,00	90	183.766.426,00	90	231.513.154,00	90	30.269.581,00		
5.05.02.2.01.0015 - Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang				0,00		160.325.880,00		183.766.426,00		231.513.154,00		269.401.581,00		
Terlaksananya Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	67,03	0	0,00	90	160.325.880,00	90	183.766.426,00	90	231.513.154,00	90	269.401.581,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				1.855.000.000,00		2.976.623.213,00		3.264.795.704,00		4.129.542.169,00		4.790.166.442,00		
Jumlah pemanfaatan hasil kelitban dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	67,03	0	1.855.000.000,00	90	2.976.623.213,00	90	3.264.795.704,00	90	4.129.542.169,00	90	4.790.166.442,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				150.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	67,03	90	150.000.000,00	90	250.000.000,00	90	300.000.000,00	90	350.000.000,00	90	450.000.000,00		

5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	250.000.000,00	90	300.000.000,00	90	350.000.000,00	90	400.000.000,00		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				150.000.000,00		274.630.927,00		308.256.493,00		400.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	67,03	90	150.000.000,00	90	274.630.927,00	90	308.256.493,00	90	400.000.000,00	90	450.000.000,00		
5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				0,00		274.630.927,00		308.256.493,00		400.000.000,00		475.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	274.630.927,00	90	308.256.493,00	90	400.000.000,00	90	475.000.000,00		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0,00		274.630.927,00		308.256.493,00		400.000.000,00		435.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	274.630.927,00	90	308.256.493,00	90	400.000.000,00	90	435.000.000,00		
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				250.000.000,00		274.630.927,00		308.256.493,00		382.768.483,00		440.700.163,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	67,03	90	250.000.000,00	90	274.630.927,00	90	308.256.493,00	90	382.768.483,00	90	440.700.163,00		
5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				0,00		274.630.927,00		295.294.788,00		382.768.483,00		440.700.163,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	274.630.927,00	90	295.294.788,00	90	382.768.483,00	90	440.700.163,00		
5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0,00		274.630.927,00		295.294.788,00		382.768.483,00		440.700.163,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	274.630.927,00	90	295.294.788,00	90	382.768.483,00	90	440.700.163,00		
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				0,00		274.630.927,00		295.294.788,00		382.768.483,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	274.630.927,00	90	295.294.788,00	90	382.768.483,00	90	450.000.000,00		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1.305.000.000,00		335.580.526,00		295.294.788,00		382.768.483,00		440.700.163,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	67,03	90	1.305.000.000,00	90	335.580.526,00	90	295.294.788,00	90	382.768.483,00	90	440.700.163,00		
5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi				0,00		218.626.198,00		250.590.580,00		315.699.754,00		367.365.790,00		

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	218.626.198,00	90	250.590.580,00	90	315.699.754,00	90	367.365.790,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				3.325.000.000,00		2.069.831.032,00		2.335.387.933,00		3.070.528.836,00		3.523.415.058,00		
Jumlah pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	67,03	84	3.325.000.000,00	87	2.069.831.032,00	91	2.335.387.933,00	93	3.070.528.836,00	95	3.523.415.058,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	67,03	84		87		91		93		95			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	67,03	90		0		0		90		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	67,03	84		87		91		93		95			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	67,03	0		90		0		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	67,03	0		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	67,03	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	67,03	0		0		0		90		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	67,03	90		0		90		0		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	67,03	0		0		90		90		90			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				425.000.000,00		425.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	67,03	90	425.000.000,00	90	425.000.000,00	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	90	450.000.000,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				825.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	67,03	90	825.000.000,00	90	200.000.000,00	90	200.000.000,00	90	350.000.000,00	90	400.000.000,00		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0,00		0,00		229.704.208,00		38.348.354,00		71.328,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	67,03	0	0,00	0	0,00	90	229.704.208,00	90	38.348.354,00	90	71.328,00		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				950.000.000,00		435.000.000,00		550.000.000,00		815.000.000,00		775.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	67,03	90	950.000.000,00	90	435.000.000,00	90	550.000.000,00	90	815.000.000,00	90	775.000.000,00		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				525.000.000,00		445.000.000,00		350.670.420,00		567.068.729,00		473.343.730,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	67,03	90	525.000.000,00	90	445.000.000,00	90	350.670.420,00	90	567.068.729,00	90	473.343.730,00		
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				300.000.000,00		0,00		250.704.208,00		0,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	67,03	90	300.000.000,00	0	0,00	90	250.704.208,00	0	0,00	90	300.000.000,00		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0,00		245.043.024,00		4.309.097,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	245.043.024,00	90	4.309.097,00	90	225.000.000,00	90	250.000.000,00		
5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				0,00		0,00		0,00		217.068.729,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	67,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	217.068.729,00	0	0,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0,00		69.788.008,00		0,00		265.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	67,03	0	0,00	90	69.788.008,00	0	0,00	90	265.000.000,00	90	275.000.000,00		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				300.000.000,00		0,00		0,00		243.043.024,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	67,03	90	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	90	243.043.024,00	0	0,00		
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	67,03	84	0,00	87	250.000.000,00	91	0,00	93	0,00	95	200.000.000,00		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Per-tanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Per-tanahan (Dokumen)	67,03	84	0,00	87	0,00	91	200.000.000,00	93	0,00	95	200.000.000,00		
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan In-formatika				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	67,03	84	0,00	87	0,00	91	200.000.000,00	93	0,00	95	200.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				1.200.000.000,00		2.404.888.185,00		2.757.496.380,00		3.472.697.295,00		4.041.023.700,00		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	90,69	90,89	150.000.000,00	90,99	389.885.119,00	91,09	456.719.931,00	91,19	512.697.295,00	91,29	665.000.000,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				150.000.000,00		389.885.119,00		456.719.931,00		512.697.295,00		665.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi riset dan inovasi daerah sesuai target	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	62,05	69	150.000.000,00	70	389.885.119,00	71	456.719.931,00	72	512.697.295,00	73	665.000.000,00		
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				150.000.000,00		389.885.119,00		456.719.931,00		512.697.295,00		665.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	62,05	69	150.000.000,00	70	389.885.119,00	71	456.719.931,00	72	512.697.295,00	73	665.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)		90,79	1.050.000.000,00	90,89	2.015.003.066,00	90,99	2.300.776.449,00	91,09	2.960.000.000,00	91,19	3.376.023.700,00		
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				1.050.000.000,00		2.015.003.066,00		2.300.776.449,00		2.960.000.000,00		3.376.023.700,00		
Jumlah hasil riset dan inovasi yang memanfaatkan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	62,05	69	1.050.000.000,00	70	2.015.003.066,00	71	2.300.776.449,00	72	2.960.000.000,00	73	3.376.023.700,00		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	62,05	69		70		71		72		73			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	62,05	69		70		71		72		73			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	62,05	69		70		71		72		73			
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				100.000.000,00		449.225.566,00		524.137.458,00		745.000.000,00		849.500.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	62,05	69	100.000.000,00	70	449.225.566,00	71	524.137.458,00	72	745.000.000,00	73	849.500.000,00		

5.05.03.2.02.0007 - Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				250.000.000,00		523.275.967,00		523.275.967,00		835.000.000,00		885.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	62,05	69	250.000.000,00	70	523.275.967,00	71	523.275.967,00	72	835.000.000,00	73	885.000.000,00		
5.05.03.2.02.0011 - Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				400.000.000,00		523.275.967,00		734.137.458,00		735.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	62,05	69	400.000.000,00	70	523.275.967,00	71	734.137.458,00	72	735.000.000,00	73	850.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				300.000.000,00		519.225.566,00		519.225.566,00		645.000.000,00		791.523.700,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	62,05	69	300.000.000,00	70	519.225.566,00	71	519.225.566,00	72	645.000.000,00	73	791.523.700,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah				
1.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0002 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
			5.05.02.2.01.0003 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
			5.05.02.2.01.0004 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.01.0005 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.01.0008 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
			5.05.02.2.01.0010 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
			5.05.02.2.01.0011 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
			5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	

			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
2.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah										
1.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,59	60,61	61,10	62,24	63,24	64,58	65,59	
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	95,42	88,38	90	90	90	90	90	
3.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	65	70	75	80	85	90	95	
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	67,03	77	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
1.	Indeks Inovasi Daerah	komulatif	Angka	58,59	60,61	61,10	62,24	63,24	64,58	65,59	
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		Persentase	95,42	88,38	90	90	90	90	90	
3.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	komulatif	Persentase	65	70	75	80	85	90	95	
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		Persentase	67,03	77	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41	

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur BRIDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BRIDA karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Review Rencana Strategis ini nantinya secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

BRIDA berperan sebagai enabler utama dalam menciptakan ekosistem inovasi daerah yang mendukung daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai fasilitator, BRIDA bertugas mengidentifikasi potensi unggulan daerah, merumuskan kebijakan berbasis penelitian, dan mengintegrasikan berbagai pihak, dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif dan berbasis data, BRIDA mendorong lahirnya solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan lokal dan tantangan global, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat transfer teknologi, dan memfasilitasi kemitraan strategis untuk memastikan inovasi daerah mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin keterpaduan :

1. Berbasis Kebutuhan Daerah.

Pelaksanaan BRIDA berangkat dari permasalahan nyata dan prioritas pembangunan daerah, bukan sekedar agenda riset akademik. Fokus pada isu strategis daerah (ekonomi, pelayanan publik, lingkungan, sosial).

2. Berorientasi pada Pemanfaatan.

Setiap kegiatan riset dan inovasi harus menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan, seperti rekomendasi kebijakan, model/produk inovasi, prototipe, sistem atau metode baru.

3. Terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan.

Kegiatan BRIDA selaras dan terhubung dengan RPJMD, RKPD dan Renstra. Riset bukan kegiatan terpisah, tapi bagian dari siklus pembangunan.

4. Kolaboratif dan Partisipatif.

Pelaksanaan BRIDA dilakukan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media.

5. Berbasis Ilmiah dan Data.

Setiap kegiatan riset dan inovasi menggunakan metode ilmiah, berbasis data dan bukti, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.

6. Inovatif dan Adaptif.

BRIDA mendorong pendekatan baru, solusi kreatif, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika lokal.

7. Efisien, Efektif, dan Akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran secara efisien, berorientasi hasil (outcome), terdokumentasi dan dapat diaudit.

8. Berkelanjutan.

Hasil riset dan inovasi tidak berhenti pada laporan, ditindaklanjuti, dikembangkan dan direplikasi bila berhasil.

9. Sesuai Regulasi.

Pelaksanaan BRIDA berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional riset dan inovasi dan pedoman teknis yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

A. Pengendalian Pelaksanaan BRIDA

Pengendalian bertujuan memastikan kegiatan riset dan inovasi berjalan sesuai rencana, target, dan ketentuan.

1. Pengendalian Perencanaan.

Kesesuaian program BRIDA dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra. Kejelasan tujuan, indikator kinerja, output, dan outcome serta penetapan jadwal, anggaran, dan penanggung jawab.

2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.

Monitoring kemajuan kegiatan secara berkala

(bulanan/triwulan). Pengawasan terhadap metode riset, tahapan inovasi, dan capaian output sesuai DPA.

3. Pengendalian Administratif.

Kelengkapan dokumen (proposal, kontrak, laporan antara, laporan akhir). Kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan dan keuangan daerah. Dokumentasi hasil riset dan inovasi.

4. Pengendalian Kolaborasi.

Pengawasan peran dan kontribusi mitra (akademisi, OPD, dunia usaha). Kepatuhan terhadap perjanjian kerja sama. Penyelesaian kendala koordinasi lintas pihak.

B. Evaluasi Pelaksanaan BRIDA

Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan BRIDA.

1. Evaluasi Kinerja.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), kesesuaian hasil dengan target yang ditetapkan, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Evaluasi Output dan Outcome.

Kualitas hasil riset dan inovasi, tingkat pemanfaatan hasil oleh OPD/pemangku kepentingan, serta kontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan atau pelayanan publik.

3. Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas.

Perbandingan antara biaya dan hasil yang dicapai serta manfaat langsung dan tidak langsung bagi daerah.

4. Evaluasi Dampak.

Perubahan atau perbaikan yang dihasilkan dari inovasi, potensi replikasi dan keberlanjutan hasil, serta dampak sosial, ekonomi, atau tata kelola.

Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap Riset dan Inovasi Daerah, tetapi juga memastikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi, dan Nasional.

Tenggarong, Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda - BRIDA Lt. 4 Tenggarong Telp. (0541) 6669156 . Fax (0541) 6669155
Website : <http://brida.kukarkab.go.id> Email : brida@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P. 3417/SK-BRIDA/P1.1/818.1/12/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 – 2029;
- b. pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategi(RENSTRA) Perangkat Daerah (Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 6. tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengandengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan Pembahasan Identifikasi Penelahaan Isu Strategis;
 - b. Mempersipkan Pembahasan Pengolahan Data dan Informasi Analisis Gambaran Pelayanan;
 - c. Melakukan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu;
 - d. Melakukan Sinkronisasi Program dan Kegiatan;
 - e. Melakukan Penajaman terhadap Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan;
 - f. Menyusun dan Mengkompilasi Data dalam Rancangan Renstra.
- Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah meliputi :
- a. Persiapan Penyusunan Renstra;
 - b. Penyusunan Rencana Awal Renstra;
 - c. Penyusunan Rancangan Renstra;
 - d. Pelaksanaan Forum;
 - e. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
- KETIGA : Tim Penyusunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Desember 2024



- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara di-Tenggarong
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
 - 3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
 - 4. Yang bersangkutan



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nomor : P. 3417/SK-BRIDA/P1.1/818.1/12/2024

Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah 2025 - 2029 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah / Penanggung Jawab : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**
- II. Ketua Program Penunjang : **Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**
- III. Ketua Program Pemerintahan : **Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
- IV. Ketua Program Sosial dan : **Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan Kependudukan**
- V. Ketua Program Ekonomi dan : **Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pembangunan**
- VI. Ketua Program Inovasi dan : **Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi**
- VII. Sekretaris :
 - 1. Perencana Ahli Muda
 - 2. Yulis Nur, S. Sos
 - 3. Endang Ernawaty, S.E
- VIII. Anggota :
 - 1. Bidang Program Pemerintahan :
 - 1. Dr. H.M. Soleh Pulungan, M.H
 - 2. Haspian Nur, S. Pd., M. Si
 - 3. Hasbianto
 - 2. Bidang Program Sosial dan Kependudukan :
 - 1. M. Subhan Nur, S.H
 - 2. M. Irmawansyah, S.E
 - 3. Hefty Yuliandany DJ, S. Sos
 - 4. Zubairi
 - 3. Bidang Program Ekonomi dan Pembangunan :
 - 1. H. Agus Wardiansyah, S. Pd., MPH
 - 2. Abdullah Majidi, S.P., M. Si
 - 3. Wismo Nugroho, S.H
 - 4. Aji Beantrik Lora Bragida, S.E
 - 5. Dana Nugraha
 - 6. Budi Santoso

4. Bidang Program Inovasi dan Teknologi :

1. H. Masriel Yunanda, S.H
2. Dayang Arniawati Anni, S.T
3. Betty Erni Susanti, S.T

5. Program Penunjang :

1. Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Denny Wahyudi, S. Sos., M. Si
3. Efdi Effendi Nasution

Ditetapkan di : Tenggara
Pada Tanggal : 24 Desember 2024

